

PENDIDIKAN PEMILIH PEMULA DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 2 NEGERI PALANGKA RAYA

Alfrid Sentosa¹, Yos Andi Tangkasiang², Akhmad Syarif³, Resviya⁴, Nicko Haryadi⁵,
Wijoko Lestario⁶

^{1,2,3,4,5}Universitas PGRI Palangka Raya ⁶Universitas Palangka Raya

¹Email: afrael09@gmail.com , ² yosat66@gmail.com , ³ syarifroeslan2018@gmail.com , ⁴ resviyapgri@gmail.com , ⁵ nichoharyadi001@gmail.com , ⁶ lestarionowijoko@gmail.com

Abstract

This article aims to describe the results of implementing community service activities to provide political education to novice voters. Through this activity, it is hoped that novice voters can increase their participation in the political process. This activity will be held in November 2023 involving participants from among beginner voters at SMKN 2 Palangka Raya. The method applied consists of, (1) pre-test to measure participants' initial understanding, (2) providing material, discussion; and (3) implementing a post-test to measure changes in participants' knowledge after being given the information. The results of this activity are useful as information for the younger generation so that they understand new voter participation. By knowing voter participation and their political rights, it is hoped that they can play more of a role in various aspects of life, especially in our political process in Indonesia.

Keywords: Voter Education, Beginners, Service

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat guna memberikan pendidikan politik terhadap pemilih pemula. Melalui kegiatan ini diharapkan pemilih pemula dapat meningkatkan partisipasinya dalam proses politik. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan November 2023 dengan melibatkan peserta dari kalangan pemilih pemula di SMKN 2 Palangka Raya. Metode yang diterapkan terdiri atas, (1) pre-test untuk mengukur pemahaman awal peserta, (2) pemberian materi, diskusi; serta (3) pelaksanaan post-test untuk mengukur perubahan pengetahuan peserta setelah diberikan informasi. Hasil pelaksanaan kegiatan ini berguna sebagai informasi kepada para generasi muda agar mereka memahami partisipasi pemilih baru. Dengan mengetahui partisipasi pemilih dan hak-hak politiknya maka diharapkan mereka dapat lebih banyak berperan dalam berbagai aspek kehidupan khususnya dalam proses politik kita di Indonesia.

Kata Kunci: Pendidikan Pemilih, Pemula, Pengabdian

Submitted: 2023-01-02

Revised: 2023-01-12

Accepted: 2024-01-15

Pendahuluan

Pendidikan pemilih menjadi inti penyelenggaraan pemilu untuk menciptakan pemilih yang rasional, yaitu pemilih yang menentukan pilihannya bukan karena tekanan atau politik uang, namun memilih karena visi, misi, kredibilitas partai politik atau calon yang akan dipilihnya. Di sinilah KPU berperan dalam menyadarkan pemilih bahwa pemilu merupakan proses demokrasi pergantian kepemimpinan yang mempunyai pola.

Program pendidikan pemilih yang dirancang dengan baik sangatlah mendesak dalam proses penyelenggaraan pemilu. Hal ini untuk menjawab tantangan dan permasalahan yang muncul dari pemilu, seperti belum maksimalnya partisipasi masyarakat. Pendidikan pemilih harus mampu memberikan informasi dan pemahaman kepada pemilih bahwa pemilu bukan sekedar berpartisipasi dan datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk menggunakan hak pilihnya. Lebih dari itu, sebagai warga negara, pemilih juga mempunyai hak yang sama dengan warga negara lainnya untuk ikut serta dalam pemilu.

Pendidikan pemilih dan sosialisasi pemilu dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan tingkat partisipasi pemilih, namun diperlukan untuk menumbuhkan pemahaman bahwa proses politik merupakan kegiatan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang terpenting, tujuan

pendidikan pemilih adalah untuk “memberdayakan” pemilih agar tidak sekedar “objek” yang mudah dimanipulasi dan dimobilisasi. Sebaliknya, mereka menjadi “subyek” yang dapat berperan aktif dalam meningkatkan kualitas pemilu dan proses demokrasi.

Melaksanakan pendidikan pemilih dan sosialisasi pemilu tidak hanya sebatas pembuatan materi sosialisasi, seperti leaflet, poster, spanduk, baliho bahkan baliho atau menyebarkan informasi pemilu melalui media baik media cetak, elektronik, maupun online. Untuk menunjang keberhasilan proses pendidikan pemilih, perlu disiapkan berbagai sarana dan prasarana yang kemudian didukung oleh jaringan. Identifikasi kelompok sasaran juga merupakan hal yang tidak lepas dari pendidikan pemilih, seperti pemilih pemula, pemilih penyandang disabilitas, pemilih perempuan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat marginal. Strategi lainnya adalah bagaimana memastikan materi dan pesan pendidikan pemilih dapat dijangkau dan dipahami oleh masyarakat.

Edukasi pemilih atau sosialisasi pemilu bukan semata-mata tugas KPU sebagai penyelenggara pemilu, namun merupakan tugas bersama seluruh elemen masyarakat, mulai dari peserta pemilu, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, lembaga pendidikan, serta organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan. Gerakan pendidikan pemilih harus digalakkan secara terstruktur, sistematis dan masif atau istilah yang sering disampaikan oleh Anggota KPU RI Ferry Kurnia Rizkiyansyah, bahwa dalam melaksanakan kegiatan pendidikan pemilih dikenal dengan “Sosialisasi Semesta” dalam arti pemilu. kegiatan sosialisasi harus mampu menembus setiap ruang dan waktu baik melalui darat, laut bahkan udara.

Kegiatan sosialisasi atau penyampaian informasi pemilu harus dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sarana dan kreativitas metode sosialisasi. Namun proses pelaksanaan pendidikan pemilih tetap memperhatikan prinsip budaya, kearifan lokal, dan karakteristik masyarakat setempat. Meminjam bahasa Anggota KPU Indonesia Juri Ardiantoro, sosialisasi tersebut merupakan wujud mewujudkan apa yang disebut dengan “Pilkada Nusantara”, atau pemilu ramah dan pemilu yang dapat mengadopsi prinsip-prinsip kearifan lokal dan ciri khas masyarakat setempat.

Keunikan budaya, adat istiadat dan kearifan lokal masyarakat dapat menjadi modal strategis dalam menentukan metode, isi dan materi sosialisasi. Kegiatan sosialisasi yang dirancang dan disesuaikan dengan konteks kearifan lokal akan lebih mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat, yang pada akhirnya akan mempengaruhi masyarakat untuk berperan aktif dalam proses penyelenggaraan pemilu dan demokrasi.

Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMK 2 Palangka Raya, tahap awal ialah melakukan kunjungan dan survei lapangan yaitu tim Pengabdian melakukan peninjauan ke lokasi mitra pengabdian untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan-permasalahan dan data dari mitra pengabdian. Setelah selesai, maka tahap berikutnya ialah penentuan tema kegiatan pengabdian ini. Pada hari pelaksanaan kegiatan Tim memberikan pretest /kuisisioner kepada siswa guna mendapatkan gambaran sejauh mana pemahaman siswa dalam memahami dan mendalami perannya sebagai pemilih dalam pemilihan umum. Setelah itu pemaparan materi oleh ketua tim pengabdian, dan diakhiri dengan diskusi/tanya jawab serta membagikan post test untuk mendapatkan gambaran tingkat penguasaan materi perannya sebagai pemilih baru dalam Pemilihan Umum.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema “Mengetahui lebih dekat Politik dan Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024” dimulai dengan pre-test kepada 50 peserta. Para peserta yang merupakan pemilih pemula diberikan kuisisioner yang berisikan

beberapa pertanyaan singkat yang mengenai Demokrasi dan Hak Warga Negara, Partai Politik dan Pemilihan Umum, serta Partispasi Politik.

Dari hasil pre-test tersebut, tim pengabdian mendapati bahwa kesadaran dan pengetahuan politik para pemilih pemula masih cukup rendah. Akan tetapi secara garis besar meski pemahaman mereka belum mendalam, para peserta mengetahui mengenai hak dan kewajiban warga negara, sistem politik di Indonesia, serta cara berpartisipasi dalam pemilihan umum.



Foto Survey sebelum kegiatan pengabdian

Sesi selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan pemberian materi mengenai pendidikan politik yang dipaparkan oleh tim pengabdian kepada masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas PGRI Palangka Raya. Adapun materi yang diberikan dengan metode ceramah dalam kegiatan tersebut meliputi:

Pemilih Pemula

Pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah mencapai usia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin (Pahmi Sy, 2010). Pemilih di setiap pemilihan umum didaftarkan melalui pendataan yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara pemilu. Pemilih pemula adalah pemilih baru pertama kali voting karena usia mereka baru masuk usia voting yaitu 17 hingga 21 tahun. Pengetahuan mereka tentang pemilu tidak jauh berbeda dengan kelompok lain, perbedaannya adalah soal semangat dan Pilihan.

Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki untuk menjadikan seseorang dapat memilih adalah:

1. WNI yang berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin
2. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya
3. Terdaftar sebagai pemilih.
4. Bukan anggota TNI/Polri (Purnawirawan / Sudah tidak lagi menjadi anggota TNI / Kepolisian).
5. Tidak sedang dicabut hak pilihnya
6. Terdaftar di DPT.
7. Khusus untuk Pemilukada calon pemilih harus berdomisili sekurangkurangnya 6 (enam) bulan di daerah yang bersangkutan.

Pemilih pemula menurut Wuryandari (2009:30) adalah "seorang yang baru pertama kali ikut pemilihan umum" (Hairil Anwar, 2012). Menurut Rudini pemilih pemula adalah baru pertama atau pernah satu kali menggunakan hak pilihnya maka kurang memiliki pengalaman dalam melakukan pemungutan suara. Minimnya pengalaman ini karena wawasan politik yang terbatas.

Sebagaimana dijelaskan dalam Modul Komisi Pemilihan Umum, yaitu: "Pemilih pemula adalah pemilih yang baru pertama kali akan melakukan penggunaan hak pilihnya. Pemilih pemula terdiri dari masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memilih" (Yan Sinatra, 2008).

Menurut Undang-undang No. 10 tahun 2008 dalam Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemilih pemula adalah warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/ pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang-undang pemilu.

M. Rusli Karim, 1991 mengemukakan bahwa kaum muda adalah kaum yang sulit didikte, bahkan ada dugaan generasi muda merupakan salah satu kelompok yang sulit didekati partai politik ataupun kontestan pemilu. Pada umumnya pemilih pemula belum memiliki literasi politik yang memadai. Pemilih pemula cenderung mengikuti tren dilingkungan tempat tinggalnya. Menurut Suhartono, 2009, pemilih pemula khususnya remaja mempunyai nilai kebudayaan yang santai, bebas, dan cenderung pada hal-hal yang informal dan mencari kesenangan, oleh karena itu semua hal yang kurang menyenangkan akan dihindari. Disamping mencari kesenangan, kelompok sebaya adalah sesuatu paling penting dalam kehidupan seorang remaja, sehingga bagi seorang remaja perlu mempunyai kelompok teman sendiri dalam pergaulan.

Pentingnya peran pemilih pemula karena sebanyak 20% dari semuanya pemilih adalah pemilih pemula, dengan demikian jumlah pemilih pemula sangat besar, sehingga hak warga negara dalam menggunakan hak pilihnya jangan sampai menjadi sia-sia hasil dari kesalahan yang tidak Diharapkan, misalnya, Anda tidak memiliki hak untuk memilih, Anda tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar atau masih banyak kesalahan dalam menggunakan hak suaranya, dll. (Sekretariat Jenderal KPU Biro Teknis dan Hupmas, 2010).

Siapun yang bisa menarik perhatian orang akan bisa merasakan keuntungan. Lahirnya dukungan dari grup ini secara tidak langsung memiliki dampak pencitraan yang signifikan. Setidaknya untuk keamanan proses regenerasi kader politik di masa depan, meskipun membutuhkan biaya tinggi tidak sedikit. Ketiadaan dukungan dari kalangan ini akan cukup merugikan untuk target perolehan suara pemilu yang telah ditentukan oleh masing-masing parpol.

Pemilih pemula yang terdiri dari pelajar, mahasiswa atau pemilih dengan rentang usia 17-21 tahun merupakan segmen yang memang unik, kerap menghadirkan kejutan dan tentunya menjanjikan secara kuantitas. disebut unik, karena perilaku pemilih pemula dengan antusias tinggi, relatif lebih rasional, haus akan perubahan dan tipis akan tingkat polusi pragmatisme.

Pemilih pemula memiliki semangat yang tinggi dalam mengambil keputusan pilihan bulat, sebenarnya menempatkan pemilih pemula sebagai pemilih ayunan sejati. (Litbang Kompas/Gianie, "Memetakan Minat pemilih pemula", (Online: www.Indonesiamemilih.com) Pilihan politik mereka tidak terpengaruh motivasi ideologis tertentu dan lebih didorong oleh konteks lingkungan yang dinamis politik lokal. Pemilih pemula mudah terpengaruh oleh kepentingan hal-hal tertentu, terutama oleh orang-orang terdekat seperti anggota keluarga, mulai dari orang tua kepada kerabat dan teman. Selain itu, media massa juga terlibat mempengaruhi pilihan pemilih. Ini bisa dalam bentuk berita di televisi, spanduk, brosur, poster, dan lain-lain.

Pemilih pemula khususnya remaja (17 tahun) memiliki nilai budaya yang santai, bebas, dan cenderung pada hal-hal yang informal dan mencari kesenangan, oleh karena itu semua hal yang kurang menyenangkan akan dihindari. Selain mencari kesenangan, kelompok sebaya adalah yang paling penting dalam kehidupan seorang remaja, maka bagi seorang remaja perlu memiliki kelompok teman mereka sendiri dalam asosiasi. (Suhartono, 2009)

Bentuk Bentuk Pendidikan Politik

Pendidikan politik sangat penting di berikan sejak dini kepada pemilih pemula, karena pada prinsipnya pendidikan politik kepada generasi muda adalah rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan guna menunjang kelestarian Pancasila dan UUD 1945 sebagai budaya politik bangsa.

Menurut Kuntowijoyo (1994; 58) mengemukakan tentang bentuk pendidikan politik, yaitu: 1) pendidikan politik formal yakni pendidikan politik yang diselenggarakan melalui indoktrinasi, 2) pendidikan politik yang dilakukan secara nonformal, seperti melalui pertukaran pendidikan melalui mimbar bebas.

Sejak dini baik orang tua atau guru-guru disekolah sudah mengajarkan kepada siswa dan siswi untuk mencintai dan menghargai akan adanya budaya atau kearifan lokal setempat, dengan cara mengajarkan Bahasa daerah dirumah dan di sekolah, memperkenalkan melalui tarian, Dayak Kalimantan Tengah kental dengan tradisi dan ritual adat yang sudah diwariskan secara turun temurun.

Nilai luhur yang terkandung didalam budaya dan istiadat Dayak diturunkan kepada generasi muda agar dapat mencintai dan melestarikannya. Huma Betang adalah menjadi karakter yang melekat kepada suku Dayak ngaju, hidup sopan, memiliki persatuan yang kuat, gotong royong, semboyan Isen Mulang semangat pantang menyerah selalu di gaungkan kepada generasi muda untuk memiliki semangat yang kuat tidak mudah putus asa. Nilai-nilai budaya kearifan lokal ini yang akhirnya membentuk karakter dan pikiran siswa. Apabila karakter sudah terbentuk dengan baik selanjutnya juga menjadi baik doktrin ini juga akan membentuk sikap politik para pemimpin daerah menjadi memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga nilai luhur yang telah diwariskan serta menjaga dan melestarikannya

Pendidikan Politik formal biasa didapatkan oleh siswa yaitu di sekolah yang diberikan oleh guru atau pun unsur-unsur yang terkait didalamnya seperti KPU, Bawaslu dan Lainnya. Melalui pelajaran PKn guru memberikan pengetahuan tentang pendidikan politik bahwa mereka memiliki hak suara berhak untuk memilih dan di pilih apabila sudah berumur 17 tahun. Dengan memberikan pendidikan ini secara dini akan memberikan pengetahuan yang luas juga akhirnya kepada siswa, pada kegiatan upacara bendera dan kegiatan ekstra kurikuler, seperti pada siswa kelas XII di kecamatan Pahandut mereka mendapatkan pendidikan politik itu ada yang melalui teori dan praktek. Guru mempunyai andil besar juga dalam mensosialisasikan politik guru menyampaikan nilai-nilai serta pandangan-pandangan politik, sebagai creator dan manipulator budaya belajar disekolah pada kenyataannya kebiasaan belajar anak dikelas secara tidak langsung akan menimbulkan akibat politik. Disamping didapatkan dirumah nilai kearifan lokal dan budaya juga didapatkan di sekolah melalui kegiatan ekstrakurikuler, tari Dayak dan seni, Bahasa dan lainnya.

Pendidikan politik adalah suatu langkah dalam mewujudkan karakter bangsa, Istilah lokal; adalah menunjukkan pada ruang interaksi terbatas dengan sistem nilai yang terbatas pula. Sebagai ruang interaksi yang sudah didisain sedemikian rupa yang didalamnya melibatkan suatu pola-pola hubungan antara manusia dengan lingkungan secara fisiknya. Hubungan itu dijalin face to face antara manusia satu dengan yang lainnya dalam suatu lingkungan. Didalam hubungan tersebut ada nilai-nilai yang terbentuk secara turun-temurun yang akan menjadi pondasi acuan tingkah laku mereka.

Pendidikan politik juga diberikan melalui mata pelajaran PPKn, pemberian pendidikan politik melalui mata pelajaran PPKn adalah salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran politik siswa, khususnya siswa kelas XII di Kecamatan Pahandut agar dapat lebih memahami tentang politik.

Kesimpulan

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu bentuk upaya dari Kampus untuk memberikan informasi kepada para generasi muda agar mereka memahami partisipasi pemilih baru. Dengan

mengetahui partisipasi pemilih dan hak-hak politiknya maka diharapkan mereka dapat lebih banyak berperan dalam berbagai aspek kehidupan khususnya dalam proses politik kita di Indonesia.

Fenomena yang terjadi terhadap pemilih pemula adalah susah dalam menentukan pilihan dan kurangnya pengetahuan dalam proses politik sehingga cenderung memilih dipengaruhi orang tua atau pihak lain.

Daftar Pustaka (10 pt)

- Hairil Anwar, Orientasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 di SMK Negeri 1 Pontianak. 2015. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora 20 (1) hal. 2
- Litbang Kompas/Gianie, "Memetakan Minat pemilih pemula", (Online: www.Indonesiamemilih.com)
- M. Rusli Karim. (1991). Pemilu Demokratis Kompetitif. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yoga.
- Pahmi Sy, (2010). Politik Pencitraan, (Jakarta: Gaung Persada Press)
- Suhartono, Tingkat Kesadaran Politik Pemilih Pemula dalam Pilkada; suatu Refleksi School-Based Democracy Education (Studi Kasus Pilkada Provinsi Banten Jawa Barat)" (Hasil Penelitian, Pascasarjana UPI, 2009) hal 6
- Sekretariat Jenderal KPU Biro Teknis dan Hupmas, "Modul: Pemilu untuk Pemula", (Jakarta: Penerbit Komisi Pemilihan Umum, 2010)
- Yan Sinatra, Isabella. Perbandingan Tingkat Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota Palembang Tahun 2008 dan Tahun 2013. 2016, Jurnal Pemerintahan dan Politik 2 (1)